

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan dari usaha pembangunan adalah untuk mencapai kesejahteraan materil maupun sprituil yang merata bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu seiring dengan perkembangan fisik, peningkatan kemampuan manusia, perubahan sikap dan perilakunya sesuai dengan perkembangan zaman perlu mendapat perhatian serius. Pembangunan hanya terlaksana dengan baik, apabila terlebih dahulu dilakukan kegiatan membangun potensi insaniah pembangunan.

Potensi insaniah pembangunan yang cukup dominan adalah generasi muda. Generasi muda dengan berbagai atributnya yang sekaligus merupakan anggapan dasar bahwa generasi muda adalah penerus nilai-nilai luhur bangsa, generasi muda adalah penerus perjuangan bangsa, generasi muda adalah penerus bangsa atau penerus keturunan, generasi muda adalah mengisi masa depan. Generasi muda adalah angkatan kerja produktif yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam menciptakan kegiatan pembangunan di segala bidang.

Menyadari akan peran dan tanggung jawab generasi muda terhadap pelaksanaan pembangunan dan kontinuitas bangsa, yang akan terus berkembang, maka generasi muda dituntut mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling mutakhir sekalipun. Di sisi lain, generasi muda dihadapkan pada era globalisasi yang senantiasa membawa dampak krisis nilai dan intelektual bagi dirinya. Erosi kredibilitas dari para pembina dan ketidakpastian masa depan telah menghilangkan acuan bagi generasi muda. Mengingat generasi muda termasuk

angkatan kerja potensial dan bercita-cita untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Untuk itu, peningkatan keterampilan dan peranan sikap hidup yang baik perlu ditumbuhkembangkan sejak dini. Maksudnya, bahwa generasi muda perlu dibina secara serius.

Generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa, serta sebagai potensi bangsa dimasa datang, diharapkan memiliki kesiapan fisik dan mental yang matang. Sehubungan dengan itu, GBHN Tahun 1998, mengamanatkan :

Pemuda sebagai kader bangsa dan kader pembangunan perlu terus meningkatkan profesionalisme kewirausahaan, komunikasi timbal balik, kebiasaan gemar membaca yang memporong semangat dan kemauan belajar dan bekerja keras untuk mengembangkan kecerdasan, keahlian dan keterampilan, serta daya nalar, berpikir kritis analitis dan tanggap terhadap tantangan dan lingkungan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. (Tap MPR RI No. II/MPR/1998).

Akan tetapi perjalanan kehidupan generasi muda tidaklah selalu mulus sebagaimana yang diharapkan bersama oleh orang tua (keluarga), masyarakat dan pemerintah. Generasi muda dalam perjalanan hidupnya, banyak yang menyimpang dari jalur yang seharusnya ia lalui. Salah satu di antaranya adalah keterlibatan generasi muda pada penyalahgunaan narkoba. Hal ini sesuai dengan penjelasan Sudarsono (1991, h.66), sebagai berikut : “Dalam beberapa dasa warsa terakhir ini penyalahgunaan narkoba sebagian dilakukan oleh kaum remaja. Khusus di Indonesia keadaan ini kerap kali melanda anak-anak remaja di kota-kota besar”.

Kondisi generasi muda dalam hal penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya dewasa ini memang sangat memperhatikan, sebagaimana diungkapkan melalui data Dirjen Dikti Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan R.I., sebagai berikut :

Bahwa penggunaan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif) di kalangan pelajar dan mahasiswa cukup tinggi, Data tersebut bersumber dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat, setidaknya terdapat 50.ribu sampai 75 ribu orang. Yang tidak terdeteksi diperkirakan mencapai 10 hingga 15 kali data yang ada. Sekedar gambaran, berdasarkan kondisi perFebruari 1999, jumlah penderita tingkat SLTP mencapai 1.055 orang , SLTA 2.096 orang, dan perguruan tinggi/akademi 1.569 orang. (Surat Kabar Harian Republika, tanggal 6 September 1999 : 9).

Data di atas menunjukkan bahwa keterlibatan remaja atau generasi muda dalam penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya sudah cukup tinggi, yang tentunya sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup remaja/generasi muda khususnya, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara pada umumnya. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangnya, baik oleh pemerintah, kalangan swasta, maupun masyarakat secara luas. Salah satu bentuk kegiatan penanggulangan yang biasa dilakukan, baik oleh pemerintah, maupun organisasi atau lembaga swasta, adalah melalui upaya pendidikan. Upaya pendidikan dimaksudkan adalah bukan hanya berlangsung dalam sekolah, melainkan di luar sekolah (Pendidikan Luar Sekolah), sebagaimana dikemukakan D. Sudjana, sebagai berikut

Pendidikan Luar sekolah adalah setiap upaya pelayanan pendidikan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup dan dijalankan dengan sengaja, teratur, terencana, dan bertujuan untuk mengaktualisasikan potensi manusia berupa sikap, tindak dan karya, menuju terbentuknya manusia seutuhnya yang gemar belajar-mengajar agar mampu meningkatkan mutu dan taraf hidupnya. (D. Sudjana, 1993, : 37).

Sejalan dengan pendapat di atas, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1993, mengamanatkan bahwa :

Pendidikan Luar Sekolah, termasuk pendidikan yang bersifat kemasyarakatan seperti kepramukaan, berbagai kursus dan pelatihan keterampilan, perlu ditingkatkan kualitasnya dan diperluas dalam rangka mengembangkan sikap mental, minat, bakat, keterampilan dan kemampuan anggota masyarakat, menyiapkan dan memberi bekal kepada warga belajar

agar mampu bekerja dan berwira usaha serta meningkatkan martabat dan kualitas kehidupannya. (TAP MPR RI No. II/MPR/1993).

Bertitik tolak dari pendapat di atas, bahwa peranan pendidikan luar sekolah adalah menghasilkan kegiatan edukatif, ditambah dengan keterampilan sehingga peserta didik terbekali untuk dapat melakukan penyesuaian yang harmonis antara perkembangan rohaniah dan pertumbuhan jasmaniah, juga mengembangkan sikap positif dan bertanggung jawab. Dengan demikian pendidikan luar sekolah menitikberatkan upaya untuk membantu peserta didik dalam mengoptimalisasikan perkembangan intelektual, perasaan, kemampuan, usaha dan keterampilan, serta untuk mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupannya.

Untuk mencapai maksud tersebut di atas, maka salah satu bentuk pelayanan pendidikan luar sekolah yang menitikberatkan pada upaya pemberian keterampilan kerja kepada peserta, yakni melalui suatu pelatihan. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja, dijelaskan bahwa :

Latihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu yang pelaksanaannya mengutamakan praktek daripada teori (D. Sudjana, 1996 : 263).

Henry Simamora (1995 : 287), mengemukakan bahwa pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seseorang individu. Pelatihan berkenaan dengan perolehan keahlian-keahlian atau pengetahuan tertentu.

Dari pengertian di atas dan dalam kaitannya dengan upaya untuk membekali keterampilan kepada remaja bekas korban penyalahgunaan narkoba agar kelak dapat menyesuaikan diri pada lingkungan masyarakatnya, tanpa senantiasa menggantungkan diri pada pihak lain terutama orang tuanya. Mengingat

bahwa tanggung jawab terhadap pengembangan dan pembinaan Remaja/anak sebagai generasi muda, merupakan tugas bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah, serta tanggung jawab generasi muda itu sendiri. Pembinaan generasi muda, dijelaskan dalam TAP MPR RI No. II/MPR/1998, sebagai berikut :

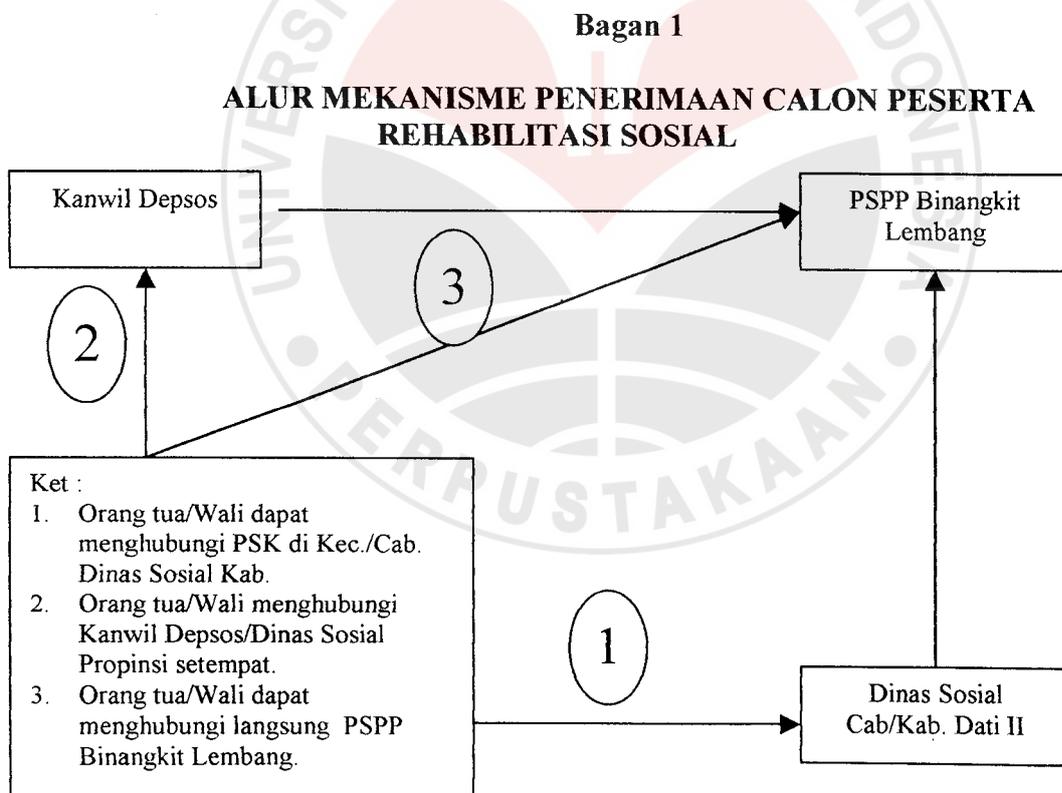
Pembinaan remaja dilaksanakan melalui peningkatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembiasaan dan penghayatan perilaku terpuji, sikap mandiri, berprestasi, dan bertanggung jawab, peningkatan budaya gemar membaca dan budaya belajar, pertumbuhan kemampuan dan daya nalar, kemampuan berinisiatif dan berpikir kritis analitis, pengembangan kreativitas dan keterampilan, peningkatan gizi dan kesehatan jasmani, penanaman kesadaran akan bahaya penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; kepekaan terhadap lingkungan dan pemahaman wawasan kebangsaan serta upaya menumbuhkan idealisme dan rasa cinta tanah air dalam pembangunan bangsa dan negara sebagai pengamalan Pancasila.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Departemen Sosial yang diberi wewenang untuk menangani masalah anak dan korban penyalahgunaan narkotika, secara teknis diwujudkan dalam bentuk kegiatan rehabilitasi sosial anak nakal dan korban penyalahgunaan narkotika, melalui sistem panti maupun non panti. Tujuannya adalah untuk memulihkan kembali integritas diri, kepercayaan diri, kesadaran dan tanggung jawab masa depan, mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan sosialnya serta memiliki kemampuan dan kemauan agar dapat melaksanakan fungsi dan peranannya secara wajar di masyarakat. Kegiatan ini bersifat rehabilitatif dan pengembangan yang meliputi kegiatan bimbingan sosial, bimbingan mental dan pelatihan keterampilan kerja/usaha.

Khusus penanganan yang dilakukan melalui sistem panti, maka sejak dimulainya pada tahun 1986 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI. Nomor 58/HUK/1986, tanggal 3 Juni 1986 tentang dimulainya pelaksanaan Rehabilitasi

Sosial Korban Narkotika dengan sarana dan fasilitas SRPGOT Marga Mulya Lembang. Dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 6/HUK/1994, tentang pembentukan 18 panti di lingkungan Departemen Sosial, salah satu diantaranya adalah “Panti Sosial Pamardi Putra ‘Binangkit’ Lembang yang terletak di Kecamatan Lembang Kabupaten Dati II Bandung Propinsi Jawa Barat hingga sekarang. Lembaga ini mendapat tugas dari pemerintah melalui Departemen Sosial, untuk menangani remaja/generasi muda khususnya wanita (puteri), yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika.

Mekanisme penerimaan Bekas Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk mengikuti kegiatan rehabilitasi pada Panti Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra “Binangkit” Lembang, dapat dilihat pada bagan berikut :



Sumber : Kantor PSPP Binangkit Lembang Kab. Bandung

Para peserta yang telah resmi diterima menjadi binaan Panti Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra “Binangkit” Lembang ini, selanjutnya diberi pembinaan, yang terbagi ke dalam lima kategori : Pertama, Pembinaan fisik, bertujuan untuk memulihkan kembali kondisi fisik peserta dari keadaan kurang sehat atau loyo menjadi sehat, bugar dan kuat. Kedua, Bimbingan mental psikologik, bertujuan untuk membentuk dan membina pertumbuhan kondisi psikis/kepribadian, emosional, dan berupaya memantapkan sikap mental, integritas diri serta disiplin diri. Ketiga, Bimbingan moral dan keagamaan, bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan kemampuan menjalankan ibadah agama. Keempat, Bimbingan sosial, bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan tingkah laku positif peserta, sehingga mereka mau dan mampu melakukan fungsi dan peranan sosialnya secara wajar, serta dapat menjalin hubungan dengan anggota keluarga dan masyarakat secara serasi dan harmonis. Kelima, Pelatihan keterampilan, yang bertujuan untuk membekali pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap, agar kelak setelah kembali ke lingkungan tempat tinggalnya, dapat memperoleh atau menciptakan suatu pekerjaan/mata pencaharian secara mandiri, sehingga secara berangsur-angsur dapat mengurangi rasa ketergantungannya kepada orang lain, terutama orang tua mereka.

Sesuai dengan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa sejak tahun 1986 hingga tahun 2000, telah dibina dalam bentuk rehabilitasi sosial sebanyak 890 orang, yang terdiri dari : Angkatan I s.d V (1986/1987-1990/1991), sebanyak 250 orang; Angkatan VI s.d. X (1991/1992-1995/1996), sebanyak 310 orang; Angkatan XI (1996/1997), sebanyak 80 orang; Angkatan XII (1997/1998), sebanyak 80 orang; Angkatan XIII (1998/1999), sebanyak 90; dan Angkatan XIV (1999/2000),

sebanyak 80 orang (Papan informasi data Panti Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra “Binangkit” Lembang, 1999). Jumlah ini disesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia, sehingga setiap tahunnya terdapat sekitar 30 % pendaftar yang tidak sempat ditampung atau dilayani.

Dari jumlah tersebut, telah diikutsertakan dalam dua jenis pelatihan keterampilan, yakni pelatihan tatarias kecantikan dan keterampilan menjahit. Khusus untuk tahun anggaran 1999/2000, telah bertambah menjadi empat jenis keterampilan yang dilatihkan, yakni keterampilan tatarias kecantikan, keterampilan menjahit, keterampilan olah makanan dan keterampilan berkebun tanaman hias.

Memperhatikan data hasil binaan Panti Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra “Binangkit” Lembang di atas, memang nampaknya kita semua patut berbangga hati, yakni betapa besar upaya pemerintah menangani Bekas Korban Penyalahgunaan Narkotika. Namun di sisi lain masih terdapat kalangan yang cenderung mempertanyakan : “Apakah mungkin orang yang pernah kecanduan narkotika dapat hidup layak kembali setelah mengikuti upaya rehabilitasi?”. Pertanyaan tersebut di dasarkan adanya asumsi bahwa kecanduan terhadap narkotika dan sejenisnya adalah tidak jauh berbeda dengan kecanduan yang dialami seorang perokok terhadap rokok yang disenanginya. Seseorang yang telah kecanduan rokok, sekalipun ia berusaha menghindari rokok (berhenti merokok), akan tetapi terkadang di saat-saat tertentu tiba-tiba muncul rasa keinginannya untuk merokok. Dan di saat seperti ini, apabila yang bersangkutan secara kebetulan mendapatkan sebatang rokok, maka biasanya cenderung mengisapnya. Demikian pula halnya dengan Bekas Korban Penyalahgunaan Narkotika, dapat saja melakukannya kembali sekalipun mereka

telah mengikuti tindakan rehabilitatif, terutama apabila terdapat dukungan dari lingkungan di mana mereka berada.

Selain dari itu, terdapat juga asumsi bahwa seorang Bekas Korban Penyalahgunaan Narkotika, apabila ia mampu melakukan usaha sendiri (mata pencaharian) untuk mendapatkan nafkah, bukanlah berarti ia semakin memiliki kesanggupan membeli narkotika dan semacamnya, melainkan ia cenderung beranggapan bahwa betapa susahnyanya untuk mendapatkan uang sebagai hasil usaha sendiri. Sehingga ia menghindari dalam menggunakan uangnya ke hal-hal yang tidak berguna, apalagi merugikan dirinya sendiri seperti narkotika dan semacamnya.

Dengan mengikutsertakan para Korban Penyalahgunaan Narkotika pada pelatihan keterampilan, dimaksudkan untuk membekali mereka pengetahuan, keterampilan dan sikap positif guna menciptakan atau melakukan suatu pekerjaan di kemudian hari setelah kembali ke lingkungan tempat tinggalnya. Menurut Petunjuk Teknis Penanganan Masalah Sosial Korban Narkotika (1996 : 20), dijelaskan tentang tujuan Pelatihan Keterampilan Usaha/kerja/sekolah, adalah sebagai berikut :
“Meningkatkan kemampuan klien dalam berbagai jenis keterampilan usaha/kerja untuk menunjang kebutuhan masa depannya dan atau melanjutkan pendidikannya”

Kemampuan seseorang yang telah mengikuti suatu pelatihan keterampilan untuk menciptakan suatu pekerjaan atau mata pencaharian sesuai dengan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap yang ia peroleh melalui pelatihan, merupakan dampak (out come) keberhasilan program pelatihan yang telah diikutinya. Dalam kaitan ini, Sudjana (1996 : 35), menjelaskan bahwa
“Pengaruh (impact) menyangkut hasil yang dicapai peserta didik atau lulusan. Pengaruh ini meliputi : (a) perubahan taraf hidup yang ditandai dengan perolehan

pekerjaan, atau berwira usaha, perolehan atau peningkatan pendapatan, kesehatan dan penampilan diri; (b) kegiatan membelajarkan orang lain atau mengikutsertakan orang lain dalam memanfaatkan hasil belajar yang telah ia miliki; dan (c) peningkatan partisipasinya dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat, baik partisipasi buah pikiran, tenaga, harta benda, dan dana”.

Adanya dampak atau pengaruh keberhasilan pelatihan keterampilan bagi para lulusannya, setelah mereka memperoleh pembinaan melalui Pantti Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra “Binangkit” Lembang Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat. Dampak atau pengaruh yang dimaksud adalah perolehan pekerjaan atau berwira usaha, yang terwujud dalam suatu pengelolaan mata pencaharian sehari-hari. Hal tersebut secara umum merupakan fokus dari penelitian ini.

B. Pembatasan Masalah/Fokus Penelitian

Perlunya pembatasan masalah/fokus penelitian ini, berkaitan keterbatasan tenaga, waktu, dana, dan kemampuan yang dimiliki peneliti. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dari dua jenis keterampilan (keterampilan menjadi dan tatarias kecantikan) yang telah diajarkan atau dilatihkan kepada peserta (lulusan) dan memungkinkan untuk ditelusuri dampaknya terhadap kehidupan peserta (lulusan), dibatasi hanya terhadap mereka yang telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan menjahit.

Adapun permasalahan yang dijadikan fokus penelitian ini adalah pengelolaan usaha mandiri (mata pencaharian) lulusan pelatihan keterampilan yang dilaksanakan oleh Pantti Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra “Binangkit” Lembang. Secara lebih terinci, masalah yang merupakan fokus penelitian ini, dapat dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

1. Sejauh mana pengaruh pengetahuan dan keterampilan lulusan pelatihan keterampilan , yang diperoleh melalui pelatihan keterampilan menjahit pada Panti Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra “Binangkit” Lembang, terhadap pengelolaan usaha mandiri (mata pencaharian) ?
2. Bagaimana merencanakan usaha mandiri (mata pencaharian) oleh lulusan pelatihan keterampilan, yang telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan menjahit ?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan usaha mandiri (mata pencaharian) dalam kegiatannya sehari-hari oleh lulusan pelatihan keterampilan , yang telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan menjahit ?
4. Upaya apa yang dilakukan guna meningkatkan pengelolaan usaha mandiri (mata pencaharian) oleh lulusan pelatihan keterampilan, yang telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan menjahit ?
5. Faktor apakah yang merupakan pendukung dan penghambat pengelolaan usaha mandiri (mata pencaharian) bagi lulusan pelatihan keterampilan ?

C. Definisi Operasional

1. Pengaruh pengetahuan dan keterampilan terhadap pengelolaan usaha mandiri (mata pencaharian)

Yang dimaksud dengan “Pengaruh pengetahuan dan keterampilan terhadap pengelolaan usaha mandiri (mata pencaharian)” dalam penelitian ini adalah kontribusi penerapan kepandaian, kecakapan yang dimiliki para lulusan pelatihan menjahit terhadap penyelesaian berbagai tugas atau pekerjaan dalam mengelola usaha (mata pencahariannya).

Diterapkannya pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui suatu pelatihan, terhadap berbagai tugas atau pekerjaan pada pengelolaan usaha mandiri (mata pencaharian), merupakan konsekuensi logis adanya kesesuaian antara tugas atau pekerjaan yang akan diselesaikan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Untuk itu, dalam menyelesaikan semua tugas atau pekerjaan pada suatu usaha mandiri (mata pencaharian), terkadang tidak cukup dengan hanya mengandalkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui satu jenis pelatihan saja, melainkan perlu dilengkapi dengan kepandaian dan kecapaian lain sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan “Pengelolaan” sendiri, dimaksudkan dalam penelitian ini adalah proses berusaha yang dilakukan oleh para lulusan pelatihan keterampilan yang telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan menjahit. Sebagaimana dijelaskan Badudu-Zein, 1994 : 650 : Pengelolaan diartikan sebagai pengurusan, penyelenggaraan atau manajemen. Selanjutnya, Donnely, Gibson dan Ivancevich, 1987 : 5, memberikan pengertian tentang manajemen, sebagai berikut : *“Management is the process undertaken by one or more individuals to coordinate the activities of other to achieve results not a chievable by one individual acting alone. And the process of management should be studied by any one planning to become successful manager”*. Yakni, manajemen adalah proses berusaha yang dilakukan oleh seseorang atau banyak orang untuk mengkoordinasi berbagai kegiatan dalam mencapai hasil, di mana kegiatan tersebut telah dapat dilakukan seseorang individu secara sendirian. Dan proses manajemen akan dimulai dari seseorang mempelajari perencanaan sampai ia menjadi manajer yang berhasil.

2. Merencanakan usaha mandiri

Yang dimaksud dengan merencanakan usaha mandiri dalam penelitian ini adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh para lulusan pelatihan keterampilan menjahit, yang berkenaan dengan upaya persiapan untuk menyelenggarakan suatu mata pencaharian. Ke dalam kegiatan ini meliputi : penentuan tujuan, penentuan lokasi (tempat usaha), penyediaan modal, dan penyediaan tenaga pengelola usaha.

Sedangkan “Usaha Mandiri” dalam penelitian ini dimaksudkan adalah kegiatan yang dilakukan oleh para lulusan Panti Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra “Binangkit” Lembang. Kegiatan tersebut dilakukan dengan sengaja atas kemauan sendiri dan atau dengan kebersamaan orang lain dalam bidang pekerjaan atau mata pencahariannya sehari-hari. Selain itu, usaha mandiri dalam penelitian ini juga dimaksudkan adalah upaya para lulusan Panti Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra “Binangkit” Lembang dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan kerja yang ia miliki, sebagai hasil pelatihan keterampilan yang telah diikutinya, terhadap pengelolaan usaha mata pencahariannya sehari-hari.

Seperti diketahui bahwa pengelolaan suatu usaha (perusahaan), baik yang bergerak di bidang produksi barang maupun jasa, mempunyai berbagai bentuk kepemilikan, begitu pula besar kecilnya jenis usaha tersebut. Menurut Vernon A. Musselman dan John H. Jackson (1989), dalam bukunya : “ Ekonomi Perusahaan : Konsep-Konsep dan Praktek-Praktek Sezaman”, mengemukakan bahwa bentuk pemilikan suatu perusahaan dapat dibedakan atas : (1) pemilikan tunggal (perusahaan perseorangan); (2) persekutuan; (3) usaha patungan; dan (4) bentuk lain, seperti koperasi dan perusahaan bersama. Sedangkan dari segi kepemilikan modal

dan jumlah karyawan, perusahaan dapat dibedakan atas : (1) perusahaan kecil; dan (2) perusahaan besar.

Berdasarkan uraian di atas, dalam pembahasan pada tesis ini hanya akan menguraikan tentang usaha (perusahaan) kecil, dengan kepemilikan tunggal (perseorangan). Perusahaan kecil, sebagaimana dijelaskan Vernon A.M, dan J.H. Jackson (1989 : 194), adalah perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan secara mandiri (independen) dan tidak dominan dalam bidang operasinya. Pada umumnya perusahaan kecil mempunyai sedikit karyawan, investasi modal terbatas, dan jumlah penjualan yang rendah. Suatu perusahaan yang dianggap kecil kalau paling sedikit terpenuhi dua dari kriteria berikut : (1)Manajemennya bebas, biasanya manajernya adalah pemiliknya; (2) Modal disediakan oleh pemilik atau sekelompok kecil individu; (3) Operasi adalah setempat. Karyawan dan pemilik bertempat tinggal dalam satu kelompok pemukiman (pasar yang dilayani tidak harus setempat); (4) Dalam bidang industri bersangkutan, ukurannya relatif kecil. Perusahaan dianggap kecil bila dibandingkan dengan unit terbesar dalam bidangnya (ukuran kelompok terbesar sangat berbeda sehingga apa yang mungkin kelihatannya besar dalam satu bidang, nampaknya kecil dalam bidang lainnya). Selanjutnya dijelaskan pula tentang karakteristik perusahaan kecil, sebagai berikut :

Manajemen. Karena manajer-manajer perusahaan kecil adalah juga pemiliknya, mereka dapat mengambil keputusan sendiri. Sebagai pelaksana kecil pemilik adalah investor dan sekaligus pengusaha. Hal ini memungkinkannya bergerak bebas dalam arti yang seluas-luasnya.

Kebutuhan modal. Jumlah modal yang diperlukan relatif kecil dibanding modal yang diperlukan oleh kebanyakan perusahaan besar. Modal ini biasanya dipasok oleh satu orang atau paling banyak oleh beberapa orang.

Operasi setempat. Bagi sebagian besar perusahaan kecil, daerah operasinya adalah wilayah setempat. Pengusaha dan karyawannya bertempat tinggal di lingkungan di mana perusahaan tersebut berlokasi. Namun ini tidak berarti bahwa perusahaan kecil hanya melayani pasar setempat.

Perbedaan antara perusahaan kecil dengan perusahaan besar, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
PERBEDAAN ANTARA PERUSAHAAN KECIL DENGAN PERUSAHAAN BESAR

Perusahaan kecil	Perusahaan besar
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Umumnya dikelola oleh pemilik ▪ Struktur organisasinya sederhana ▪ Pemilik mengenal karyawannya ▪ Persentase tinggi dalam kegagalan perusahaan ▪ Kurangnya manajer berspesialisasi ▪ Sukar mendapat modal jangka panjang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biasanya dikelola oleh bukan pemilik ▪ Struktur organisasinya kompleks ▪ Pemilik mengenal hanya sedikit karyawannya ▪ Persentase rendah dalam kegagalan perusahaan ▪ Biasanya terdapat manajemen berspesialisasi ▪ Modal jangka panjang biasanya relatif mudah diperoleh

Sumber : Vernon A. Musselman & John H. Jackson, 1989: 196.

Memperhatikan perbedaan kedua bentuk usaha (perusahaan) di atas, bila dikaitkan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin meningkatnya sumber daya, khususnya sumber daya manusia, baik mutu maupun jumlahnya, serta berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, maka

perbedaan-perbedaan yang cukup mencolok tersebut dapat diperkecil. Misalnya dari segi sumber daya manusia, perusahaan kecil dapat mempersiapkan sumber daya yang handal, terampil dan profesional melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui pelatihan keterampilan.

Dari segi permodalan, dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, berarti usaha kecil bukan berarti sulit untuk mendapatkan bantuan permodalan, namun jangka waktu pemberian bantuan modal tetap disesuaikan dengan volume usaha yang dilakukan oleh perusahaan kecil yang bersangkutan. Seperti dikemukakan pada penjelasan pasal 25 undang-undang tersebut di atas, bahwa :

Tata cara pembiayaan dan peminjaman Usaha Kecil diupayakan dengan sederhana dan mudah serta dengan persyaratan yang ringan. Prioritas pemberian pembiayaan dan penjaminan diberikan kepada kelompok atau lapisan Usaha Kecil yang jumlahnya paling besar, sedangkan jangka waktu pembiayaan ditetapkan secara luwes, sesuai dengan kelayakan dari Usaha Kecil yang bersangkutan (B.N.Marbun, 1996 : 139).

Sebaliknya perusahaan yang berskala besar, jumlahnya tidak sedikit yang telah mendapatkan bantuan permodalan cukup besar serta jangka waktunya yang relatif panjang, namun tidak sedikit pula dari jumlah perusahaan tersebut telah menyalahgunakan pinjaman modal yang diberikan kepadanya, akibatnya negara yang dirugikan. Dari kenyataan ini, bukan tidak mungkin di masa yang akan datang suasananya menjadi terbalik, yakni pemberian pinjaman yang berjangka panjang justru lebih banyak diperuntukkan bagi perusahaan kecil.

Mengenai perusahaan dengan kepemilikan tunggal (perusahaan perseorangan), sebagaimana dijelaskan oleh Vernon A.M, dan J.H. Jackson (1989 : 70), adalah suatu perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan oleh satu orang (di

Indonesia, bentuk perusahaan seperti ini dikenal dengan sebutan perusahaan perseorangan). Bentuk ini adalah yang paling banyak dan sederhana serta paling lama dari organisasi perusahaan.

Setelah menyimak penjelasan tentang perusahaan kecil berikut karakteristiknya, dan perusahaan perseorangan, maka pengelolaan usaha mandiri oleh mereka yang telah mengikuti pelatihan keterampilan menjahit pada Panti Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra “Binangkit” Lembang yang menjadi fokus penelitian, adalah jenis usaha yang memadukan kedua ciri di atas, yakni usaha mandiri yang kecil dan dikelola perseorangan. Dalam artian bahwa tidak tertutup kemungkinan usaha mandiri (mata pencaharian) tersebut mempekerjakan orang lain, sekalipun jumlahnya terbatas.

3. Mekanisme pelaksanaan usaha mandiri dalam kegiatannya sehari-hari

Yang dimaksud dengan : “Mekanisme pelaksanaan usaha mandiri dalam kegiatannya sehari-hari” dalam penelitian ini adalah cara kerja dalam melakukan kegiatan usaha (mata pencaharian) setiap hari, guna mendapatkan keuntungan (laba), yang meliputi : menyiapkan dan mengolah bahan menjadi hasil produksi, memasarkan hasil produksi, peralatan kerja, pengadministrasian kegiatan usaha, dan cara untuk mewujudkan kesehatan dan keselamatan kerja.

4. Meningkatkan pengelolaan usaha mandiri

Yang dimaksud dengan : “Meningkatkan pengelolaan usaha mandiri” dalam penelitian ini adalah proses kegiatan, baik yang telah maupun yang sedang dilaksanakan oleh para lulusan pelatihan keterampilan menjahit, selaku pengelola usaha (mata pencaharian), guna menambah atau semakin memperbaiki pelaksanaan usahanya. Termasuk ke dalam proses kegiatan ini meliputi : penambahan dan

perluasan lokasi (tempat usaha); penambahan modal, baik jumlah, penggunaan, maupun pengamanannya; penambahan tenaga pengelola, meliputi jumlah personil, serta penambahan pengetahuan dan keterampilannya; penambahan peralatan kerja, baik jumlah, mutu, maupun perawatannya; perbaikan produksi, meliputi jumlah, jenis dan mutunya; perluasan pemasaran, meliputi cara dan prekuensinya; perbaikan administrasi usaha, meliputi jenis dan cara mengerjakannya; dan upaya memperbaiki penanganan kesehatan dan keselamatan kerja, baik berupa tindakan maupun penyediaan sarannya.

5. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan

Yang dimaksud dengan : “Faktor pendukung pengelolaan” dalam penelitian ini adalah sesuatu hal (keadaan, peristiwa) yang menyokong, membantu, atau menunjang proses berusaha (bermata pencaharian), yang dilaksanakan oleh para lulusan pelatihan keterampilan menjahit. Sedangkan “Faktor penghambat” adalah sesuatu hal (keadaan, peristiwa) membuat proses berusaha (bermata pencaharian) yang dilaksanakan oleh para lulusan pelatihan keterampilan menjahit, menjadi lambat, tidak lancar. Kedua faktor tersebut, baik pendukung maupun penghambat, dapat bersumber dari pengelola itu sendiri (internal), serta dapat bersumber dari luar (eksternal).

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pengelolaan usaha mandiri atau mata pencaharian sehari-hari para lulusan pelatihan keterampilan, khususnya keterampilan menjahit, yang telah selesai mengikuti pembinaan pada

Panti Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra “Binangkit” Lembang Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui tentang pengaruh pengetahuan dan keterampilan lulusan pelatihan keterampilan, yang diperoleh melalui pelatihan keterampilan menjahit pada Panti Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra “Binangkit” Lembang, terhadap pengelolaan usaha mandiri (mata pencaharian).
2. Mengetahui tentang cara merencanakan usaha mandiri oleh lulusan pelatihan keterampilan, yang telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan menjahit.
3. Memperoleh gambaran tentang mekanisme pelaksanaan usaha mandiri (mata pencaharian) dalam kegiatannya sehari-hari, oleh lulusan pelatihan keterampilan, yang telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan menjahit.
4. Memperoleh gambaran tentang upaya yang dilakukan guna meningkatkan pengelolaan usaha mandiri (mata pencaharian) oleh lulusan pelatihan keterampilan, yang telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan menjahit.
5. Memperoleh gambaran tentang faktor pendukung dan penghambat pengelolaan usaha mandiri (mata pencaharian) bagi lulusan pelatihan keterampilan.

E. Manfaat Penelitian

Informasi yang dapat diungkapkan melalui penelitian ini, diharapkan bermanfaat untuk :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan kompetensi profesional Pendidikan Luar Sekolah, khususnya terhadap pengelolaan sistem pembelajaran melalui suatu pelatihan keterampilan.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam upaya perbaikan atau penyempurnaan penyelenggaraan pelatihan keterampilan, khususnya keterampilan menjahit bagi Bekas Korban Penyalahgunaan Narkotika di Panti Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra “Binangkit” Lembang, serta penyempurnaan dalam mengelola usaha mandiri (mata pencaharian), sebagai salah satu dampak dari hasil penyelenggaraan suatu pelatihan.

F. Kerangka Berpikir

Upaya pembelajaran melalui pelatihan keterampilan menjahit yang dilakukan oleh Panti Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra “Binangkit” Lembang Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat, merupakan salah satu wujud penyelenggaraan satuan Pendidikan Luar Sekolah yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut. Hasil pelatihan ini tentunya memberikan pengaruh atau dampak terhadap diri para lulusannya setelah kembali kemasyarakatnya.

Dari sinilah penelitian ini ingin melihat gambaran tentang apa yang dilakukan oleh para lulusan pelatihan keterampilan menjahit tersebut, berkaitan dengan mata pencaharian yang dilakukannya. Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir penelitian ini dapat dijelaskan dalam sebuah bagan, sebagaimana tertera pada bagan 2 (pada halaman berikut) :

Bagan 2
KERANGKA BERPIKIR PENELITIAN

